

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ade Maman Suherman dan J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur)*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program
- Amirudi dan Zainal Asikin, 2004, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Arikuntu Suharsimi.2002. *Prosedur Suatu Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V. Jakarta:Rineka Cipta
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta:Djambatan
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K Lubis, 1996, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cetakan Kedua, Jakarta:Sinar Grafika
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:PT Bumi Aksara
- CST. Kansil. 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka)
- Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Rajawali Press
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa
- Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*
- Irawan Soehartono, 2002, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung:Remaja Rosda Karya:
- John Salindeho, 1993, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Jakarta : Grafika
- J. Satrio, , 1992, *Hukum Waris*, PT. Citra Aditya Bakti:Bandung
- M. Idris Ramulyo, 1994, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Cetakan ke-1, Jakarta:Penerbit Sinar Grafika

- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana; Jakarta
- Rahmad Budiono, 1999, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung:PT. Aditya Citra Bakti
- Ronny H. Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia
- Sayid Sabiq, 2009, *Fiqh Sunnah*, Pen: Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta : Cakrawala Publishing, jilid 5
- Sayuti Thalib, 2016, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Edisi revisi ke-2, Sinar Grafika, Jakarta
- Shalih Bin Ghanim As-Sadlan Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid. 2009, *Intisari Fiqih Islam, lengkap dengan jawaban praktis atas permasalahan Fiqih sehari-hari*, cet. 2 ; Surabaya; pustaka La Raiba Bima Amanta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo
- S. Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrassi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, Edisi ke-2 Cetakan ke-5, Yogyakarta: Liberty
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung :Alfabeta
- Sulaiman Rasyid, 1954, *Fiqh Islam*, Jakarta:Attahirujah
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Jakarta : Sinar Grafika
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah* , Jakarta :Kencana Predana Media
- Wantijk Saleh, 1985, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta :Ghalia Indonesia
- Zainuddin ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan tarif atas PNPB yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang tentang Kompilasi Hukum Islam;

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata cara Pelaporan wasiat dan permohonan penerbitan surat keterangan wasiat secara elektronik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;

### **C. Jurnal**

- Afif Fakhri, 2020, *Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Hibah Wasiat terhadap Sengketa Waris (Studi Perkara Nomor: 944/Pdt.G/2017/PA.Stb)*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Ahmad Siddiq Ridha, 2021, *Akibat Hukum Hibah Wasiat Tanah Yang Tidak Didaftarkan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
- Alfia Raudhatul Jannah, *Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat Dan Hibah Wasiatkajian Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2017/Pa.Pbr*, Jurnal ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila
- Aprilianti. 2021, “*Syarat Dan Prosedur Pembuatan Dan Pencabutan Surat Wasiat Oleh Notaris Berdasarkan Kuhperdata Dan Peraturan Jabatan Notaris*”. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Biro Hukum dan Humas Badan Pertanahan Nasional, 1998, *Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta: Koperasi Pegawai Badan Pertanahan Nasional “Bumi Bhakti”.
- Febert Ricardo Pinontoan, 2021, *Pelaksanaan Hibah Wasiat Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Tanpa Ahli Waris Legitimaris Yang Tidak Mencantumkan Pelaksana Wasiat*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- I Gusti Ayu Putu Oka Cahyaning Mustika Sari, dkk, 2017, *Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah Wasiat Oleh Pelaksana Wasiat*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Riven Meyaga Firdausya, 2014, *Kedudukan Pelaksana Wasiat dalam Akta Hibah karena Wasiat*, Jurnal Hukum Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
- Yanuar Suryadini dan Alifiana Tanasya Widiyanti, 2020, *Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime Portie*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga

#### **D. Internet**

<http://www.klinik-pajak.com/knowledge-base/bphtb> <http://siaksoft.net/?p=475>, di akses tanggal 8 Januari 2023

[http://www.indonesianpropertylaw.com/index.php?p=1\\_16](http://www.indonesianpropertylaw.com/index.php?p=1_16) diakses tanggal 8 Januari 2023

<http://misaelandpartners.com/artikel-hibah-warisan-wasiat-dan-hibah-wasiat/>, diakses tanggal 02 April 2023

[https://id.wikipedia.org/wiki/Akta\\_autentik](https://id.wikipedia.org/wiki/Akta_autentik), diakses tanggal 02 April 2023

Dany Garjito | Rifan Aditya,

<https://www.suara.com/news/2020/04/30/141506/hukum-waris-islam-ketahui-4-syarat-dan-3-rukunnya?page=2>, diakses tanggal 14 April 2023

Salma Ramadhani, <https://kumparan.com/salma-1usbBruqX41/full>, diakses tanggal 14 April 2023

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-1t6236c9ba3d767/?page=2>, Pembagian harta waris menurut hukum perdata, diakses pada hari senin, tgl 29 Mei 2023

Josef Henokh Widodo, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/hak-hak-atas-tanah-yang-dapat-dimiliki-warga-negara-asing-atau-badan-hukum-asing-di-indonesia/>, diakses pada hari rabu, tanggal 19 juli 2023

